Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi)

Legal Analysis on Evidences Toward The Free Verdict in Narcotics (A Case study in Kendari Court Number 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi)

Yusuf Mars

Wakil Polisi Resor Kabupaten Muna
E-mail: yusufmars134@gmail.com

Herman

Pascasarjana Universitas Halu Oleo
E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com

Handrawan

Pascasarjana Universitas Halu Oleo
E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

Abstract: *The judge in considering the imposition of this case decision is based on consideration of balance in terms of the conditions specified by the Act or the indictment of the Public Prosecutor. However, the Judge did not assess ownership or control of a narcotics in the purpose and purpose. Proof in this case is in accordance with the provisions of the Act where proof in this case is proof that is built on the Act Positive. Proof in this case does not lead to proof of the abuse of authority of the defendant as an investigator who violates the Standard Operating Procedure for storing the Tester which is also a violation of the National Code of Ethics of the National Police.*

Keyword: *efidences; free verdict; narcotics*

Abstrak: *Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara ini berdasarkan pertimbangan keseimbangan dalam hal terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dakwaan dari penuntut Umum. Namun Hakim tidak menilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika pada maksud dan tujuannya. Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dimana pembuktian dalam kasus ini ialah pembuktian yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Secara Positif. Pembuktian dalam kasus ini tidak mengarah pada pembuktian penyalahgunaan wewenang terdakwa sebagai penyidik yang melanggar Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Tester dimana terhadap hal tersebut juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.*

Kata kunci: *pembuktian; putusan bebas; tindak pidana narkotika*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹ Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHP tersebut, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat yaitu: Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan Atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara multi disipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Kontroversi muncul pada saat penjatuhan hukuman, dimana Sakaruddin Bin Mingkan yang merupakan Anggota Polri divonis bebas, sedangkan terhadap terdakwa Albadrin Elat alias Ambon dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Terhadap putusan Majelis Hakim atas terdakwa Sakaruddin Bin Mingkan, Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi namun Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr.

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78.

² Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.

Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dengan anggotanya masing-masing Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Suhadi, S.H., M.H., menolak permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan putusan nomor 1730 K/PID.SUS/2017 tertanggal 11 Desember 2017 dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dalam latar belakang masalah adalah.

Pertama Penerapan pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak cukup alat bukti dalam memenuhi unsur kedua sebagai unsur obyektif dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa;

Kedua. Penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak cukup alat bukti dalam memenuhi unsur kedua sebagai unsur obyektif dalam dakwaan kedua atas perbuatan terdakwa;

Ketiga Terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menangani perkara tersebut dengan nomor perkara 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi dijatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan hukum jika unsur pasal yang didakwakan tidak cukup alat bukti sehingga secara objektif tidak terpenuhi.

Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam putusan nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi dan ketentuan hukum pembuktian dalam perkara nomor: 405/Pid.Sus/2017/PN.Kdi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bentuk *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang

dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.³ Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan Cara mengkaji kasus hukum yakni putusan bebas tindak pidana narkoba, Konsep Pembuktian, dan konsep Putusan Hakim. Penelitian ini menekankan Pada analisis putusan bebas tindak pidana narkoba.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2016/Pn.Kdi

Posisi kasus tersebut dapat dipahami bahwa pemilik Narkoba golongan I jenis shabu adalah terdakwa yang akan melakukan penjualan dibantu dengan seseorang untuk menjadi perantara menghubungkan kepada pembeli. Terdakwa yang posisinya sebagai pelaku juga telah mengetahui bahwa ia dan dengan *niat* akan melakukan penjualan terhadap Pembeli. Terhadap kasus ini juga tergambar bahwa ada unsur kesengajaan dimana kesengajaan sendiri yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.⁴ Terdakwa menghendaki akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa barang jenis narkoba.

Penerapan hukum pidana materiil dalam dakwaan Pertama masih sangat kabur untuk menentukan peran dari terdakwa yang hanya diperoleh dari keterangan saksi Jika dikorelasikan dengan posisi kasus sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan *pertama*-nya, sangat sulit dibuktikan karena selain karena di dalam persidangan saksi juga membantah uraian yang dideskripsikan oleh Penuntut Umum terkait dengan adanya dugaan pemufakatan jahat untuk menjual narkoba jenis shabu kepada seseorang.

Adapun *dakwaan kedua* dimana terdakwa didakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Penulis bahwa yang pertama harus dipastikan adalah apakah terdakwa memperoleh kemudian menyimpan dan menguasai narkoba

³ Sabrina Hidayat. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2. 2017. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 21 Desember 2018, hlm. 183.

⁴ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 2011. hlm. 98.

jenis shabu seberat tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi juga keterangan dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu adalah tester yang telah dilaporkan kepada Wakil Direktur sebagai Pimpinan di Direktorat Narkoba Polda Sultra dimana barang bukti tersebut adalah bukan berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun berasal dari tindakan sah terdakwa sebagai Penyidik Pembantu pada Unit 2 Subdit II Direktorat Narkoba.

Penguasaan Narkoba sejalan dengan ketentuan atau kewenangan yang dimiliki pelaku jika kepemilikan narkoba tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau mendapat keuntungan dari barang tersebut dengan niat untuk menjualnya.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 yang memberikan pertimbangan hukum *“bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”*. Tujuan dari kepemilikan suatu narkoba seharusnya tidak dibuktikan dalam hal hanya pada kepemilikannya saja. Tetapi maksud kepemilikannya harus dikonstruksikan dengan maksudnya.

Adapun Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua, menurut Penulis bahwa hal tersebut menjadi mutlak untuk menentukan perbuatan terdakwa dengan menilai pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan karena dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum. Berbeda halnya, jika Majelis Hakim meyakini salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, maka yang dipertimbangkan hanya salah satu dari dakwaan yang menurut Majelis Hakim mudah untuk dibuktikan karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif.

Ada beberapa yang seharusnya menjadi pertimbangan dimana Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-Undang; Doktrin atau ajaran; Yurisprudensi. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau

menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.⁵ Menurut van Bummelen yang dikutip oleh Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya.⁶

Membuktikan berasal harus juga dibangun berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Artinya seharusnya ada pertimbangan hakim dalam memutus perkara berlandaskan sebab tersangka yang notabene merupakan bagian penyidik kepolisian. Apa yang menjadikan sebab tersangka membawa jenis narkoba. Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo⁷ mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam hal perkara di muka pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan pembuktian.⁸ Pembuktian dari segi hukum acara pidana yaitu⁹, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilalui jalan yang panjang dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan hakim. Jalan tersebut salah satunya surat tuduhan, surat tuduhan mengandung dua aspek yang kadang-kadang tidak begitu jelas terpisah dan kedua aspek itu disebut sebagai aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek itu harus diperhatikan oleh hakim, Setelah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan yang dituduhkan itu merupakan perbuatan yang diancam pidana dan ditetapkan kesalahan

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003. hlm. 10.

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 77.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Cet. I*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983 hlm. 5.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), cet. VIII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 274.

terdakwa, maka diputuskan tentang pidananya.¹⁰ Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.¹¹ Menurut Achmad S. Soemadipradja,¹² menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

Selanjutnya mengenai Putusan Bebas Tidak Murni Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onstlag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onstlag van rechtsvervolging*). Terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹³

Sementara itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 74-77.

¹¹ Darwan Prinst. *Hukum Aara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan. 2002. hlm. 159.

¹² Kelik Pramudya. *Putusan Bebas (Vrijspraak)*, <https://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.

¹³ Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001. hlm. 5

perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁴ Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini merupakan pertimbangan yang dinilai hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang tanpa memperhatikan keadaan si pembuat atau terdakwa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang seharusnya turut memberi dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁵

Putusan Hakim dalam kasus ini merupakan putusan yang hanya mengedepankan pertimbangan yuridis dan berdasarkan pembuktian saksi di persidangan, tanpa melihat sebab dapat ditemukannya pelaku akan memperjual belikan narkotika. Beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, di antaranya berdasarkan teori keseimbangan, keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.¹⁶ Hakim dalam pertimbangan dalam kasus ini mempertimbangkan syarat ketentuan yang ditentukan Oleh Undang-Undang. Tanpa melihat kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika atau sejenisnya dilihat maksud dan tujuannya.

Hakim seharusnya menilai bahwa pertimbangan bahwa untuk mencegah atau demi kepentingan umum memberantas tindak pidana narkotika terdakwa tidak diputus bebas. Karena selain terdakwa terbukti membawa narkotika jenis shabu. Walaupun itu telah diketahui berdasarkan fakta di persidangan merupakan tester. Namun terdakwa telah terlebih dahulu memiliki niat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika, di tambah pula terdakwa merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang seharusnya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁶ *Ibid*, hlm.105

memberi contoh untuk mencegah perbuatan tindak pidana narkoba. Pencegahan terhadap bahaya narkoba, tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum itu sendiri. Pencegahan itu dilakukan untuk mencegah narkoba merembet pada keadaan lingkungan sosial yang rusak. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan moral, yaitu dengan meningkatnya kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.¹⁷

Analisis Hukum Pembuktian Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/Pn.Kdi

Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:¹⁸ Pada dakwaan *Pertama* terdakwa Sakaruddin melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Dakwaan kedua* terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan paket tersebut merupakan Narkoba Golongan I, dan susunan dakwaan disusun dengan dakwaan alternatif *pertama* karena terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemufakatan jahat, sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 132 ayat

¹⁷ Moh.Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. hlm.16.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, hlm. 3-7.

(1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Dakwaan *keduanya* disusun dengan pertimbangan terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga didakwa dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Penuntut Umum setelah melalui tahap pembuktian tidak mampu membuktikan dakwaan *Pertama* yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam perkara ini terdakwa dituntut melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.

Dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut Umum ialah dakwaan pertama yang hanya dibangun berdasarkan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemufakatan jahat, ini akan terbantahkan karena dakwaan tersebut tidak menilai bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai penyidik. Dakwaan *kedua*, Penyidik hanya berdasarkan pada dugaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. kelemahan dari dakwaan kedua oleh Penuntut umum karena juga tidak mempertimbangkan terdakwa yang memiliki *wewenang* menyimpan narkotika golongan I.

Tuntutan jaksa penuntut Umum seharusnya dibangun berdasarkan Pasal 56 KUHP, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, dan barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu dan barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini seharusnya penuntut umum memintai bahwa ketiga orang antara terdakwa, perantara dan pembeli yang melakukan perbuatan pelaksanaan. Elemen dari peristiwa tindak pidana atau bekerja sama dalam melakukan tindak Pidana Narkotika.

Karena dalam kasus ini telah terjadi *niat* untuk melakukan perbuatan pidana di antara ketiga orang tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan individu dari terdakwa

sendiri dapat dimintai pertanggungjawabannya. Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana karena telah merencanakan atau membantu dan yang memberikan kontribusi dalam perencanaan dari suatu perbuatan tindak pidana Narkotika.

Sistem pembuktian ini hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yang berarti apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali yang juga disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip "*penghukuman berdasar hukum*. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-Undang yang berlandaskan asas Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹⁹

Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan saksi terdakwa dan timnya sedang melakukan koordinasi di dalam rangka rencana penyelidikan tindak pidana narkotika. Artinya pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang menjalankan tugas sebagai penyidik pembantu. Dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum terbantahkan oleh keadaan atau kewenangan terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan.

Selanjutnya mengenai putusan bebas dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.²⁰ Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai

¹⁹ *Ibid*, hlm. 257

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm.436

pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.²¹

Pembuktian berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) saset paket narkoba yang diketemukan pada diri terdakwa adalah “tester” yaitu pembelian terselubung yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyidik pembantu melalui saksi yang diketahui oleh Kasubdit Wakil Direktorat Kepolisian. Maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) saset plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah *bukan berasal dari tindak pidana* yang dilakukan oleh terdakwa namun berasal dari tindakan sah terdakwa sebagai Penyidik Pembantu pada Unit II Subdit II Dit Narkoba Polda Sultra.

Pembuktian dalam kasus ini berdasarkan teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) dimana Sistem pembuktian ini hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu yang berarti apabila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali yang juga disebut sebagai teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum. Sehingga dalam kasus ini dengan dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian di persidangan maka hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti dan di putus bebas.

Tindakan terdakwa seharusnya dikonstruksikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.²² Wewenang terdakwa tidak termaksud membawa barang jenis narkoba apalagi terdakwa didapati akan melakukan penjualan barang jenis narkoba tersebut. Tindakan terdakwa menyalahi wewenangnya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya turut serta membantu dalam pemberantasan tindak pidana

²¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008 hlm. 287.

²² Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22

narkotika. Karena Polisi sebagai alat Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²³Wewenang yang diberikan kepada terdakwa tidak lagi kepada fungsinya.

Wewenang yang diberikan kepada terdakwa bukan untuk memiliki atau membawa barang jenis Narkotika dan tindakan terdakwa yang membawa tester dan tidak menyimpan di Kantor Subdit II Dit Narkoba Polda Sultra adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Tester terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bagian Keempat tentang Penyimpanan dan Pelaporan disebutkan bahwa “pelanggaran mengenai ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa: Teguran; Peringatan; Denda administratif; Penghentian sementara kegiatan; atau Pencabutan izin.

Tentunya ketentuan di atas tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik namun juga berlaku untuk Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis lebih cenderung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan terbukti jika dakwaan dibangun berdasarkan adanya kewenangan dari terdakwa. Perbuatan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana dan sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, sehingga terdakwa tidak diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam putusan nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan-

²³ Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. hlm 52

ketentuan hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara ini berdasarkan pertimbangan keseimbangan dalam hal terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dakwaan dari Penuntut Umum. Namun Hakim tidak menilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba pada maksud dan tujuannya.

2. Pembuktian berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan barang bukti di persidangan menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dimana pembuktian dalam kasus ini ialah pembuktian yang dibangun Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Pembuktian suatu perbuatan disesuaikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam ketentuan Undang-Undang. Pembuktian dalam kasus ini tidak mengarah pada pembuktian penyalahgunaan wewenang terdakwa sebagai penyidik yang melanggar Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Tester dimana terhadap hal tersebut juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), cet. VIII*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kelik, Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan. 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, cet. I*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Jurnal

- Hidayat, Sabrina, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Halu Oleo Law Review. Volume 1 Issue 2. 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses tanggal 21 Desember 2018.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan.

Situs internet

- Pramudya, Kelik. *Putusan Bebas (Vrijspraak)*, <https://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.